

# PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS

(Studi di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten)

## Latar Belakang

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun undang-undang tersebut belum mengatur secara jelas mengenai penyelenggaraan UKM di Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Untuk mendukung penyelenggaraan UKM di Puskesmas, dibutuhkan beberapa penguatan sumber daya seperti SDM, sarana, prasarana, dan pembiayaan.

## Rekomendasi

- Perlu penguatan kebijakan dan juga pendekatan yang efektif agar Puskesmas dapat lebih dekat dengan masyarakat,
- Perlu rancangan undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai kesehatan masyarakat.
- Penanganan berbagai masalah kesehatan masyarakat seperti kesehatan ibu dan anak; penyakit menular; dan penyakit tidak menular dilakukan dari bagian hulu yaitu pemberian UKM tingkat pertama oleh Puskesmas.
- Penguatan UKM melalui peningkatan kapasitas, kuantitas, dan persebaran SDM kesehatan

## Tujuan

- mengetahui gambaran kondisi kesehatan masyarakat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
- mengetahui penguatan terhadap UKM di Puskesmas jika dilihat dari aspek SDM, sarana, prasarana, pembiayaan, dan koordinasi
- mengetahui kendala dan harapan dalam penyelenggaraan UKM di Puskesmas

## Hasil Temuan

Kota Bogor dan Kota Tangerang Selatan masih memiliki berbagai permasalahan kesehatan masyarakat seperti kesehatan ibu dan bayi; penyakit menular; dan penyakit tidak menular.

## Kendala

- belum optimalnya pemberian UKM oleh Puskesmas.
- karakteristik masyarakat perkotaan yang cenderung tertutup dari jangkauan Puskesmas,

Walaupun UKM diperkuat, bukan berarti Puskesmas kehilangan fungsi kuratif dan rehabilitatif

